

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini implementasi pembangunan sektor ketenagalistrikan mempunyai peranan yang sangat esensial dan strategis dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional maupun regional. Peranan tersebut tidak hanya sebatas pemanfaatan energi listrik sebagai sarana produksi untuk mendukung pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan, akan tetapi juga sebagai faktor yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam beberapa studi terkait pemanfaatan (konsumsi) energi listrik, Wallace (2008), Arief (2011) dan Adam (2012) menyimpulkan bahwa, sektor ketenagalistrikan telah dipandang sebagai sektor basis pembangunan yang menjadi landasan dan memberikan kontribusi cukup besar bagi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengubah struktur perekonomian negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan peran sektor ketenagalistrikan agar memiliki kapabilitas yang diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan regional di Indonesia, maka pemerintah perlu mengatur penyediaan, distribusi dan pemanfaatan energi listrik antarkawasan dengan berbagai kebijakan, sehingga ketersediaannya memadai, merata dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sejalan dengan semakin

berkembangnya jumlah penduduk, pertumbuhan pembangunan perkembangan industrialisasi, dan dinamika kehidupan masyarakat. Keharusan pemerintah dalam mengatur penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan energi listrik ini perlu dilakukan melalui kebijakan yang efektif seperti penambahan pembangunan pembangkit energi listrik yang baru ke semua kawasan, pengembangan sumber-sumber energi listrik baru dan terbarukan, pengaturan tarif dasar listrik yang dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana produksi secara berkala, termasuk pelaksanaan program penghematan penggunaan energi listrik, sehingga ketersediaannya dapat tetap terjaga dan tidak menimbulkan defisit pasokan energi listrik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat..

Untuk mengatur produksi, distribusi dan pemanfaatan energi listrik guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, maka pemerintah Indonesia membentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan pengelolanya. Perusahaan ini selanjutnya berfungsi menyediakan dan memasok energi listrik baik untuk memenuhi kepentingan konsumsi rumah tangga, industri maupun kebutuhan lembaga ekonomi dan badan sosial lainnya. Tujuan yang diharapkan adalah : Pertama, tercipta distribusi tenaga listrik secara merata dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Kedua, mendorong peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi melalui penggunaan energi listrik secara optimal. Dan yang ketiga, mengembangkan pembangunan sektor kelistrikan wilayah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah yang semakin berkembang (Anonim, 2007).

Di Indonesia, pembangunan sektor kelistrikan wilayah bukan hanya

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, akan tetapi juga untuk masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah perdesaan. Khusus untuk memenuhi tujuan yang kedua, program pengembangan kelistrikan wilayah diimplementasikan dengan maksud mewujudkan asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan ini selain menjadi refleksi dari upaya pemerintah untuk memperkecil kesenjangan (gap) pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia, tetapi juga antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Di samping itu juga, menjadi barometer dari keberhasilan program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di berbagai daerah termasuk di Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan sektor kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah Maluku Utara telah dilakukan sejak dasawarsa 80-an. Akan tetapi, pada tahap awal pembangunannya, distribusi produksi energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Pengembangan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baru dilakukan oleh pemerintah daerah setempat pada dasawarsa 90-an dan terus diperluas secara bertahap hingga sekarang. Dengan berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, pada dasawarsa 2000-an hingga tahun 2020, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berhasil memperluas jangkauan pelayanan kelistrikan wilayah hingga mencapai 84,75 persen rumah tangga penduduk di wilayah provinsi ini. Indikasi ini merefleksikan bahwa permintaan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi energi listrik di berbagai daerah di provinsi ini terus meningkat.

Akan tetapi, permintaan konsumsi masyarakat terhadap energi listrik di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan yang rendah periode 2011-2020. Selama periode tersebut, permintaan energi listrik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga hanya meningkat 16.834.517 KWH per tahun atau tumbuh rata-rata sebesar 8,44 % per tahun. Banyak faktor yang secara teoritis dipastikan berimplikasi terhadap hal tersebut. Selain tarif (harga) dari energi listrik itu sendiri, maka faktor lain yang turut menentukan permintaan energi listrik di provinsi ini adalah harga barang substitusi dari energi listrik seperti penggunaan alternatif alat penerangan lain, sarana dan prasarana energi listrik, pendapatan masyarakat, jumlah rumah tangga, selera, dan lain sebagainya. Dengan mengasumsikan faktor-faktor lain di luar tarif listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah pelanggan rumah tangga konstan, penelitian ini mencoba menelaah ketiga faktor tersebut di atas dalam kaitan dengan permintaan energi listrik di Provinsi Maluku Utara berikut menawarkan rekomendasi sebagai solusi dalam pemecahan masalah dimaksud.

Dua hasil penelitian empiris terdahulu menyangkut permintaan energi listrik akan dikaji dan digunakan sebagai basis analisis dan bahan bandingan disertai pendekatan teoritis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik terutama yang berkaitan dengan tarif, pendapatan masyarakat dan jumlah rumah tangga. Dalam studi mereka tentang Permintaan Energi Listrik Rumah Tangga (Studi Kasus

Rumah Tangga di Kota Bengkulu), Nilman dan Mintargo (2019), menemukan pengaruh yang signifikan antara tarif/harga listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah rumah tangga terhadap permintaan konsumsi energi listrik di Kota tersebut. Dalam penelitian ini, ditemukan pula tanda parameter dugaan dari semua peubah bebas yang diteliti, yaitu tarif (harga) riil listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah rumah tangga sesuai dengan teori. Hal itu berarti peubah bebas tarif/harga riil listrik berhubungan tidak searah (negatif) dengan permintaan energi listrik sebagai peubah tidak bebasnya, sedangkan peubah bebas pendapatan masyarakat dan jumlah pelanggan rumah tangga berhubungan searah (positif) dengan permintaan konsumsi energi listrik. Sementara dalam studi mereka tentang Pengaruh Efisiensi Energi Listrik Pada Sektor Industri dan Sektor Komersial Terhadap Permintaan Listrik di Indonesia (2018), Mulyani dan Hartono menemukan pengaruh yang signifikan dari semua peubah bebas yang diteliti terhadap permintaan konsumsi energi listrik agregat di Indonesia periode 2001-2013, termasuk peubah bebas tarif/harga riil listrik, pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk.

Dari dua hasil studi yang dikemukakan di atas memberikan deskripsi teoritis bahwa, perilaku masyarakat dalam melakukan permintaan energi listrik sangat ditentukan oleh perubahan yang terjadi pada berbagai faktor penentu permintaan tersebut seperti tarif riil listrik, jumlah pelanggan rumah tangga, dan pendapatan masyarakat. Karena itu, dengan merujuk pada gambaran hasil studi tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh tarif, pendapatan masyarakat, dan jumlah rumah tangga terhadap permintaan

energi listrik di Provinsi Maluku Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun pembangunan sektor kelistrikan wilayah untuk memberikan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara telah dilakukan pemerintah relatif lama, yaitu sejak dasawarsa 80-an, akan tetapi, jangkauan pelayanan energi listrik di provinsi ini belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara mencukupi. Banyak faktor sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya keterbatasan tersebut. Salah satu di antaranya adalah pilihan kebijakan pemerintah yang terlalu terkonsentrasi memberikan pelayanan kelistrikan wilayah pada daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Konsekuensinya, cakupan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat-pusat pemerintahan menjadi terbatas dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mewujudkannya.

Hingga memasuki dekade dasawarsa 2000-an dan sampai dengan tahun 2020, pelayanan sektor kelistrikan wilayah di Provinsi Maluku Utara baru mencakup 84,75 % jumlah rumah tangga penduduk dengan pola permintaan yang cenderung bervariasi. Bervariasinya pola permintaan energi listrik di daerah ini yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang cenderung rendah mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) Maluku dan Maluku Utara sebagai Pengelola Sektor Kelistrikan Wilayah belum optimal. Karena itu struktur permintaan energi listrik cenderung menjadi tidak linear meningkat, bahkan pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan yang cukup besar.

Secara spesifik, dalam periode tahun 2011-2020, permintaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang rendah, rata-rata hanya meningkat 16.834.517 Kwh per tahun atau tumbuh sebesar 8,44 % per tahun. Karena itu, dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah tarif riil listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk (rumah tangga) berpengaruh terhadap permintaan konsumsi energi listrik di Provinsi Maluku Utara periode 2011-2020 ?
2. Apakah perubahan permintaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Provinsi Maluku Utara dalam periode yang sama elastis terhadap perubahan tarif riil listrik, pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk (rumah tangga) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh tarif riil listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk (rumah tangga) terhadap permintaan konsumsi energi listrik di Provinsi Maluku Utara periode 2011-2020.
2. Menganalisis tingkat kepekaan perubahan permintaan energi listrik (elastisitas) terhadap perubahan tarif riil listrik, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk (rumah tangga) di Provinsi Maluku Utara selama periode yang sama.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukannya bagi :

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan upaya percepatan peningkatan pembangunan sektor kelistrikan wilayah di provinsi ini.
2. Pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara Rayon Ternate dalam mengevaluasi program dan kebijakan serta kinerjanya dalam pengelolaan pembangunan sektor kelistrikan wilayah di Provinsi Maluku Utara
3. Peneliti lain yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini, baik sebagai kelanjutan dari penelitian ini di daerah yang sama ataupun di daerah lainnya dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi di bidang ketenagalistrikan.